



Deskripsi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terkait Dengan Potensi Pertahanan Berdasarkan Keunggulan Geostrategis dan *Blue Economy*

Endro Tri Susdarwono^{1,a}

^a Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Peradaban Bumiayu

Abstract. *As an archipelago state that has a vast and rich sea area, Indonesia is challenged to make marine resources the basis of future economic development. This can be started by growing maritime point of view for the community and the government. Indonesian-oriented maritime development is realized through increasing the capacity of human resources with an oceanic perspective. The country is rich in marine biological resources, by developing fisheries and coastal areas. Therefore, in my opinion, It should be needed for a grand design development that is oriented towards the development of blue economy. Coastal and marine resources could be an alternative as a role in contributing to regional and world economic growth.*

Keywords: *Economic Growth, Blue Economy, Economic Development*

Abstrak. Sebagai suatu Negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas dan kaya, Indonesia ditantang untuk menjadikan sumberdaya kelautan sebagai basis pengembangan ekonomi ke depan. Ini bisa dimulai dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah. Pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan. Negara ini kaya akan sumberdaya hayati laut, perikanan dan wilayah pesisir. Oleh karena itu menurut saya diperlukan adanya grand design pembangunan yang berorientasi pada pengembangan blue economy. Sumberdaya pesisir dan laut berperan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi baik regional dan dunia.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Blue Economy, Pembangunan Ekonomi*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri lebih dari 17.504 pulau dan diyakini masih ada pulau-pulau yang belum diketahui. Belasan ribu pulau tersebut diceraiberaikan oleh perairan (laut) yang amat luas (5,8 juta km² Luasnya > 3 kali luas daratan). Oleh karena itulah Indonesia dikenal sebagai negara maritim

¹ **Korespondensi:** saniscara99midas@gmail.com



terbesar di dunia. Namun demikian sebutan “Negara Maritim” tersebut tidak tercermin dari aktivitas penduduknya, yang amat sedikit berorientasi ke laut.²

Letak geografis perairan NKRI diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Hindia) serta merupakan penghubung Blok Barat (Eropa) dan Blok Timur (Asia), menjadikan perairan Nusantara banyak/sering dilintasi kapal asing sejak dahulu kala. Letaknya yang ditengah-tengah daerah Khatulistiwa memungkinkan segala jenis ikan dan biota laut hidup dan berkembang biak dengan cepat. Hal ini mengundang nelayan-nelayan asing berburu sumberdaya alam laut (SDL) secara liar (illegal fishing), dikarenakan otoritas, pengamanan dan pemberdayaan SDL kita sangat lemah.³

Memantapkan pembangunan NKRI yang adil dan merata dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan social serta sarana dan prasarana ekonomi, mengurangi kesenjangan social, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek serta menegaskan kembali komitmen keberpihakan pada masyarakat daerah yang masih tertinggal merupakan tujuan yang hendak diraih dalam hal mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Indonesia harus menjadi bangsa yang memiliki daya saing dengan menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan kompetitif. Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat diukur dari meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat dan terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Sebagai suatu Negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas dan kaya, Indonesia ditantang untuk menjadikan sumberdaya kelautan sebagai basis penembangan ekonomi ke depan. Ini bisa dimulai dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah. Pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan, dan membangun ekonomi nasional secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Pada saat

² Umar Tarmansyah, *Strategi Penguatan Penegakan Kedaulatan Wilayah Negara Di Laut* (Puslitbang Indhan Balitbang Dephan), halaman 1.

³ *Ibid.*

yang sama perlu diupayakan berbagai prakarsa inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan produksi sector kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

Indonesia sebagai Negara kepulauan perlu membangun pertahanan yang kuat dalam matra laut, sebagai Negara maritime kekuatan laut adalah potensi pertahanan yang segera diadakan. Mengingat keunggulan geostrategic yang dimiliki Indonesia dan potensi *blue economy* Indonesia yang dimiliki maka sudah sewajarnya Indonesia menjadi Negara Maritim yang kuat di Dunia.

Pada dasarnya konsepsi pertahanan merupakan bagian inheren dalam penyelenggaraan negara. Perkembangan wacana pertahanan sering mengalami pergeseran sejalan dengan dinamika pemikiran politik luar negeri dan dalam negeri. Persoalan mendasar yang senantiasa muncul dalam pembahasan konsepsi pertahanan adalah masalah sulitnya mencari format baku yang lebih terfokus mewujudkan sistem pertahanan yang ideal pada suatu negara. Banyak kendala yang dihadapi, terutama masalah alokasi anggaran.⁴

Besar alokasi anggaran pertahanan di suatu negara tidak bisa dilepaskan dari tingkat kesejahteraan rakyat. Negara yang kuat diidentikan dengan pertahanan yang kuat dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. "...Pertahanan merupakan status kesiagaan tiap negara dalam mengantisipasi datangnya ancaman keamanan nasional, regional maupun internasional, baik dalam keadaan damai maupun terjadi peperangan...".⁵ Negara membutuhkan pertahanan yang kuat untuk melindungi kepentingan berkaitan dengan perekonomian dan berkaitan dengan penggunaan diplomasi, dengan pertahanan yang kuat negara mampu melindungi wilayahnya baik darat, laut, dan udara.

Negara dalam rangka membentuk pertahanan yang kuat dan moderen memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Seringkali di suatu negara untuk membentuk pertahanan yang kuat terbentur dengan sedikitnya alokasi anggaran yang dianggarkan untuk pertahanan. Negara yang berkembang terutama, terjadi permasalahan dalam penganggaran alokasi untuk pertahanan. Negara berkembang

⁴ Kirbiantoro dan Dody Rudianto, 2010, *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Golden Terayon Press, hlm. v

⁵ *Ibid*, hlm. 1.



membutuhkan perekonomian yang kuat dalam rangka mendukung penganggaran pertahanan.

Perekonomian yang kuat di suatu negara mutlak berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat diwujudkan dalam kebijakan ekonomi yang tepat. Kesejahteraan rakyat bukanlah konsep abstrak, melainkan kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupan sehari-hari. "...Diterjemahkan dalam bahasa ekonomi teknis adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap...".⁶ Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat, tidak digerogeti oleh kenaikan harga.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang "deskripsi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terkait dengan potensi pertahanan berdasarkan keunggulan geostrategis dan blue economy."

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan: bagaimana deskripsi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terkait dengan potensi pertahanan berdasarkan keunggulan geostrategis dan *blue economy*?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya.

⁶ Boediono, 2010, *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?*, Jakarta : KPG, hlm. 27.

⁷ *Ibid*, hlm. 28.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan penetapan sampel dengan cara *nonprobabilitas sampling* atau *nonrandom sampling* dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling* disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan. Sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, sampel yang dihubungi adalah sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka meliputi sumber yang relevan dengan permasalahan; catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan dokumen lainnya. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan yang diperlukan, dan inventarisasi bahan (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

Analisis data (*analyzing*), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Bahan (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terkait Dengan Potensi Pertahanan

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara langsung dapat mempengaruhi besar kecilnya alokasi anggaran pertahanan di suatu negara. Negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi, ada kaitan langsung antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan besar-kecilnya alokasi anggaran pertahanan.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu sasaran pembangunan. Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali



dengan pendapatan riil perkapita. Selanjutnya, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan merupakan penerimaan dan timbulnya dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu negara diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/GNP.

Pertumbuhan Ekonomi suatu Negara juga tidak lepas dari tingkat penganggurannya. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi *trade off* antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi.

Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah. Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran

didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran berkurang.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010–2014, terurai berbagai permasalahan di bidang pertahanan. Untuk postur pertahanan misalnya, keterbatasan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan berdampak pada masih rendahnya anggaran pertahanan.



Pada awal RPJMN 2004-2009, alokasi anggaran pertahanan sebesar 1,1 persen PDB, tetapi dalam pelaksanaannya justru menunjukkan penurunan. Dalam tiga tahun terakhir belanja pertahanan berturut-turut 0,92 persen PDB (2007); 0,70 persen PDB (2008); dan 0,63 persen PDB (2009).

Menurut Buku Putih Pertahanan (Dephan, 2008) dalam rangka mewujudkan minimum essential force dalam 2-3 tahun mendatang total anggaran pertahanan diharapkan dapat mencapai di atas 1 persen dari PDB dan selanjutnya meningkat menjadi minimal 2 persen dari PDB dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan. Pengeluaran anggaran pertahanan negara kita, masih jauh di bawah negara negara di kawasan Asia Tenggara. Negara dengan wilayah terluas dan penduduk terbesar di Asia Tenggara justru anggaran militernya hanya 0,7 persen dari PDB atau hanya menduduki urutan ketujuh.

Menurut laporan Bank Dunia dan SIPRI (2012), selama 2000-2012, persentase PDB untuk anggaran militer negara Asia Tenggara masing masing adalah Singapura mencapai 4,3 persen PDB; Brunei Darussalam 3,2 persen; Vietnam 2,2 persen; Malaysia 2,0 persen; Thailand 1,4 persen; dan Filipina 1,4; serta Indonesia berada dalam posisi terendah mencapai 0,7 persen dari PDB. Berdasarkan rata rata jumlah anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh SIPRI, pada periode 2000-2011, Singapura mengalokasikan US\$ 7,5 miliar sehingga menempati peringkat pertama. Jumlah anggaran Indonesia hanya nomor empat terbesar, yakni US\$ 3,7 miliar setelah Malaysia sebesar US\$ 3,8 miliar, dan Thailand US\$ 3,7 miliar.

Dilihat dari total anggaran yang disediakan, Singapura juga menjadi yang terbesar dengan angka total US\$ 70,2 miliar pada periode 2003-2011. Indonesia di posisi ketiga sebesar US\$ 36 miliar setelah Malaysia US\$ 38 miliar. Dilihat dari pengeluaran untuk sektor pertahanan, tampak jelas bahwa Singapura ingin membangun kekuatan militer yang mumpuni bahkan serius membangun hegemoni militer di Asia Tenggara. Bahkan dengan alokasi anggaran militernya yang tinggi terhadap PDB, telah menempatkan negara mungil di Asia Tenggara tersebut termasuk negara yang sangat militeristik. Singapura berada dalam posisi kedua setelah Israel sebagai negara paling militeristik di dunia berdasarkan indeks militerisasi global (GMI).

2. Potensi Kemaritiman Kota Tegal dan Kabupaten Tegal dengan Industri Logam Berat, Industri Komponen, dan Industri Perkapalan Menuju Industri Pertahanan yang Mandiri

Postulat bahwa ekonomi Indonesia akan maju apabila perekonomian daerah juga berkembang adalah suatu hal yang merupakan keniscayaan di dalam pendekatan ekonomi agregat. Studi-studi empiris mengenai perkembangan perekonomian suatu Negara dan perkembangan suatu daerah juga mendukung hal tersebut.

The Jakarta Consulting Group mengembangkan suatu kerangka kerja yang disebut dengan SIREN (*Strategic Intervention for regional Economic Development*). Pendekatan ini pada hakikatnya, mengandung beberapa komponen utama yaitu :

1. Mencoba melihat akar permasalahan bukan sekadar simtoma. Pendekatan SIREN didahului dengan kata SI (*Strategic Intervention*) yang menggambarkan bahwa setiap saat pemerintah sedang melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan RED (*Regional Economic Development*) sehingga dengan demikian suatu pendekatan yang baru secara otomatis harus diposisikan sebagai suatu intervensi untuk mempercepat kebijakan yang telah diambil.
2. Pendekatan *Strategic Intervention* ini akan membawa konsekuensi permbdayaan berbagai dimensi mengalami kenaikan dan positif maka dimensi/subdimensi lainnya juga akan turut naik demikian sebaliknya jika salah satu dimensi/subdimensi kurang atau negative maka hal ini, juga akan mempengaruhi dimensi dan subdimensi lainnya.
3. Di dalam prosesnya akan memanfaatkan apa yang disebut informasi geospasial seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional, yang antara lain menyatakan bahwa:
 - a. Data spasial sebagai data yang berkaitan dengan unsure keruangan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Data spasial diperlukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional;
 - c. Penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan data spasial antar



- instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

Sejalan dengan Peraturan Presiden tersebut, Stimson, Stough dan Roberts (279, 2006) juga menyatakan bahwa penggunaan informasi spasial sangat penting untuk membangun sistem pendukung pemuat keputusan. Para ahli ini juga memperkenalkan Multi Sector Analysis untuk menilai keunggulan dan risiko daerah serta menekankan kebutuhan akan adanya alat yang baru. Hal ini tentunya masuk akal dan benar oleh karena cirri kedaerahan adalah perbedaan dari sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya manusia dan sumber daya budaya serta kemajuan dan keterbelakangan dari modernisasi sehingga bukan hanya diperlukan alat yang baru tapi alat yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing walaupun mempunyai konsep dan kerangka pemikiran yang jelas di dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal inilah yang dituangkan dalam pendekatan *Strategic Multidimensional Analysis (SMA)*.

4. Mengembangkan strategi secara khusus yang bersifat “*out of the box*” dan menyangkut beberapa dimensi penentu yang disebut Determinant Dimensions yang terdiri dari *Revenue Generating Dimensions*, *Critical Supporting Dimensions*, *Primary Competitive Dimensions*.
 - a. *Revenue Generating Dimensions*, merupakan kumpulan dari beberapa dimensi dan subdimensi yang mempengaruhi pendapatan suatu daerah bahkan dapat merupakan sumber penghasilan di suatu daerah tertentu.
 - b. *Critical Supporting Dimensions*, merupakan kumpulan dari beberapa dimensi dan subdimensi yang mempengaruhi dan mendukung *Revenue Generating Dimensions* suatu daerah.
 - c. *Primary Competitive Dimensions*, merupakan kumpulan dari beberapa dimensi dan subdimensi yang menjadi keunggulan dari daerah tersebut dilihat dari sisi pemerintahan yang ada di suatu daerah.

Dimensi dan subdimensi dikelompokkan berdasarkan fungsinya untuk keperluan analisis strategic manajemen agar dapat diberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Perkembangan industri galangan kapal di Indonesia saat ini masih terhambat oleh adanya komponen kapal yang sebagian besar masih harus

impor. Salah satu komponen kapal tersebut adalah komponen kapal yang dibuat dengan proses pengecoran (*casting iron*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djati Pramono dalam judul tugas akhirnya "*Studi Evaluasi Dan Pengembangan Industri Penunjang Dok Dan Galangan Kapal Di Tegal Ditinjau Dari Aspek Teknis Dan Ekonomis*", menuliskan bahwa industri yang memproduksi komponen kapal hanya merupakan industri sampingan (*side product*) disamping produk-produk yang utama.

Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan karena sistem pemasaran yang belum memadai. perkembangan industri galangan kapal di Indonesia akan berpengaruh besar terhadap perkembangan industri penunjang komponen kapal, karena industri galangan kapal akan banyak mengkonsumsi komponen-komponen industri penunjang, khususnya industri penunjang yang memproduksi komponen-komponen perlengkapan kapal. Industri penunjang tersebut diharapkan dapat memasok kebutuhan dari industri strategis tersebut akan pemenuhan kebutuhan material komponen yang dibutuhkannya. Selain itu tujuan dikembangkannya industri penunjang ini untuk mengurangi ketergantungan Industri yang ada di tegal terhadap material yang didatangkan dari luar kota sebagai ketersediaan bahan dasar atau baku untuk proses produksinya.

Keberadaan industri penunjang ini diharapkan dapat memasok kebutuhan akan komponen kapal di Indonesia sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Menurut M. Faizal Riza dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Teknis Dan Ekonomis Pembangunan Industri Manufaktur Baling-Baling Kapal*", menyebutkan bahwa tingginya bea masuk impor sangat berpengaruh terhadap industri perkapalan di Indonesia karena sebagian besar bahan baku pembuatan kapal masih diimpor. Sekitar delapan puluh persen pasokan peralatan dan komponen berasal dari luar negeri.

Ketergantungan terhadap impor membuat industri perkapalan industri perkapalan kurang berkembang. Padahal industri kapal di luar negeri mampu menyokong 90 persen bahan baku dari produk lokal mereka (Kompas, 2008). Hal ini disebabkan karena kemampuan industri pendukung nasional yang



masih rendah. Sebagian besar negara yang menguasai industri galangan dunia adalah negara yang mempunyai ketersediaan terhadap industri penunjang dan pendukung.

Agar pasar yang ada tidak jatuh ke galangan kapal di luar negeri, galangan kapal nasional hendaknya meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Ini berkaitan dengan penerapan asas cabotage yang telah membawa dampak peningkatan jumlah armada kapal nasional sehingga peluang reparasi terhadap armada kapal semakin besar.

Keberadaan sentra industri komponen kapal di Kota Tegal, Jawa Tengah (Jateng), diperkirakan akan mengalami geliat yang cukup membawa efek nasional. Terutama dalam memenuhi berbagai *order* dari industri galangan kapal di Tanjung Uncang, Batam. Pasalnya, pasokan untuk berbagai jenis komponen kapal dari Kota Bahari tersebut, akan dipakai untuk memenuhi berbagai kebutuhan komponen kapal di daerah ini, yang jumlahnya mencapai 70 industri galangan kapal eksisting. Bukan hanya itu, potensi pasokan untuk berbagai jenis komponen kapal bagi pembangunan kapal-kapal baru dan reparasi di Tanjung Uncang – yang rata-rata dibangun dalam jumlah *series* – nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Saat ini, UD Setia Kawan yang merupakan industry perkapalan memasok berbagai komponen kapal bagi galangan PT Daya Radar Utama, PT Sanur Marindo Shipyard, PT Citra Bahari, PT Lintas Bojonegoro Nusantara, PT Janata dan galangan kapal lainnya. Sentra industri komponen kapal UD Setia Kawan *metal casting & ship equipment* adalah perusahaan swasta dengan spesialisasi pembuatan komponen kapal laut (*marine/ship equipment*). Beberapa komponen kapal yang diproduksinya meliputi *side scuttle, square window, gate valve*, handel pintu kedap, *air pipe head*, jangkar, *clino meter*.

Kota Tegal hingga kini masih menjadi basis industri komponen mesin di Tanah Air. Kota pesisir Utara Jawa Tengah ini banyak memiliki industri komponen yang mampu memasok komponen mesin ke berbagai industri besar. "Tegal sebagai pusat machining industry, karena pertumbuhan dan perkembangan sekian lamanya Tegal punya kekuatan menyuplai komponen alat berat, otomotif, perkapalan, alat kesehatan, alat pertanian.

Saat ini setidaknya ada 7.541 IKM logam, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 36.200 orang. Dari pelaku IKM itu mencakup 71 IKM industri logam alat berat, 52 IKM industri otomotif dan elektronika, 10 IKM industri kapal, 13 IKM industri alat kesehatan dan 13 IKM industri alat pertanian.

Kementrian Perhubungan sejak tahun 2011 telah berupaya membangun Pelabuhan Niaga. Pada tahun 2013 pelaksanaan pembangunan memasuki tahap III dengan target output berupa groin sheetpile sepanjang 105 m berbiaya 10 M. Proses pembangunan yang ditargetkan selesai pada tahun 2015 ini akan mengubah kolam pelabuhan menjadi lebih dekat dengan laut lepas. Dengan demikian, diharapkan di masa datang Pelabuhan Tegal tidak hanya menjadi sarana singgah kapal-kapal niaga dan nelayan, tapi juga menjadi tempat singgah kapal penumpang. Harapan ini bukannya tidak mungkin, mengingat Pelabuhan Tegal telah terdaftar di International Maritim Organization (IMO, Organisasi Kemaritiman Internasional).

"Nilai transaksi dari industri komponen kapal ini sangat besar, jadi bagaimanapun caranya industri komponen lokal, harus bisa mengambil peluang yang besar ini. Sebenarnya industri komponen untuk kapal ini bisa dibuat di industri dalam negeri, khususnya di Tegal, Jawa Tengah, namun ada beberapa kendala yang cukup berat, seperti biaya pengiriman dari Tegal ke Batam jauh lebih mahal dibanding dari Singapura. Demikian juga waktu pengiriman. Impor dari Singapura pengirimannya hanya hitungan jam sementara dari Pulau Jawa bisa berminggu-minggu. Oleh karena itu, Pemerintah setempat bertekad akan memajukan industri komponen lokal dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga kebutuhan komponen kapal ini bisa dipasok dari dalam negeri.

Pengembangan paduan aluminium-nikel bronze untuk aplikasi model baling-baling kapal penumpang berdaun lima pada IKM pengecoran logam di Kabupaten Tegal juga sudah mulai dikembangkan. Baling-baling kapal merupakan salah satu komponen penting kapal yang memberikan tenaga dengan mengubah putaran mesin menjadi gaya gerak atau gaya dorong pada kapal. Keandalan suatu baling-baling kapal ditentukan oleh kekuatan, daya tahan aus dan korosi yang dimiliki, dimana peranan jenis logam paduan



sangat menentukan. Dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan industri kecil pembuat komponen kapal yang merupakan potensi kabupaten Tegal, maka dilakukan riset pengembangan pembuatan baling-baling kapal penumpang, khususnya baling-baling berdaun lima dengan pengecoran paduan Al-Ni bronze. Dalam tulisan ini dibahas peramuan dan aplikasi paduan Al-Ni bronze untuk pengecoran model baling-baling kapal penumpang berdaun lima dengan memvariasikan kandungan aluminiumnya. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan cetakan kombinasi, yaitu cetakan kulit (shell moulding) dan cetakan green sand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan paduan B dengan target Al sebesar 9% memiliki komposisi kimia yang sesuai dengan standar, dimana kandungan Al aktual sebesar 8,65% dan memiliki kekerasan sebesar 170,2 BHN. Sedangkan perancangan paduan A dan C memiliki kandungan Al aktual sebesar 6,7% dan 11,21%, namun di luar batasan standar BKI. Dengan demikian rancangan paduan B dapat dijadikan acuan untuk pembuatan prototype baling-baling dengan ukuran sebenarnya.

3. Dual Use Pelabuhan

Dalam pembangunan kota, konsep pembangunan dengan rancangan bangun dual use memberikan manfaat yang lebih baik, yaitu manfaat untuk sipil dan manfaat untuk kepentingan pertahanan. Rancang bangun dual use dapat menekan biaya dan lebih mengoptimalkan manfaat dari suatu bangunan. Misalnya adalah pembangunan pelabuhan yang dapat digunakan selain untuk berlabuhnya kapal perdagangan juga dapat digunakan untuk kapal militer. Fasilitas pelabuhan disiapkan sedemikian rupa sehingga dapat mendukung pengoperasian kapal militer jika suatu waktu digunakan untuk penugasan pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam konteks itulah pelabuhan memainkan peran penting sebagai tempat berlabuhnya perahu. Fungsi utama pelabuhan, tidak sekadar tempat berlabuh, tetapi juga tempat berkumpul untuk berdagang. Kata bandar dalam Bahasa Inggris (harbor) mengacu pada fungsinya sebagai tempat berlindung dan berteduh. Selain itu, istilah lain yang berdekatan maknanya dengan bandar adalah port yang melihat pelabuhan sebagai pintu gerbang, tempat kapal dan perahu keluar masuk.

Lapian menyebutkan, bahwa pelabuhan merupakan penghubung antara seberang laut dengan daerah pedalaman dalam suatu interaksi, khususnya perdagangan maritime. Perkembangan pelabuhan serin diikuti munculnya kota-kota pelabuhan di Kawasan pesisir, juga menambah intensitas komunikasi para saudagar di pelabuhan.

Menurut Anthony Reid, kedudukan pelabuhan sangat penting dalam perdagangan maritime Asia Tenggara, terutama pada pola pelayaran tradisional yang memanfaatkan angin muson yang bertiup teratur sepanjang tahun. Dari bulan April sampai Agustus, angin bertiup ke utara menuju daratan Asia. Sebaliknya, dari bulan Desember sampai Maret angin bertiup ke arah selatan, yakni dari daratan Asia ke Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Pergantian muson ini secara langsung mempengaruhi route pelayaran. pada kondisi ini, terutama saat menunggu pergantian arah angin, pelabuhan sangat penting sebagai tempat untuk berlabuh, memperbaiki dan memastikan system navigasi dapat dijalankan dalam pelayaran. Pola muson dan route pelayaran juga berpengaruh terhadap perkembangan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara, dimana para pedagang menunggu pergantian muson atau kedatangan rekan dagangnya. Selama masa menunggu, para awak kapal dan penumpang memenuhi perkapungan kota, meramaikan pasar, dan ikut dalam upacara-upacara ritual.

4. Potensi Pertahanan Berdasarkan Keunggulan Geostrategis dan *Blue Economy*

Sebagai bagian dari program pembangunan jangka menengah Kota Tegal tahun 2009-2014, Tegal Maritim merupakan konsep sinergitas pembangunan dengan mengakselerasi potensi kemaritiman agar memberikan arah perbaikan dan peningkatan derajat kesejahteraan bagi masyarakat, dengan memberikan dorongan, dukungan, pendampingan terhadap sumber-sumber potensi alam yang ada, baik sektor riil dan jasa, sehingga tercapai peningkatan pendapatan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ideal Tegal Maritim ini akan dicapai dengan strategi antara lain: Perbaikan manajemen sumber daya perikanan melalui: Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan melalui revitalisasi kapal dan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta optimalisasi lahan pertambakan.



Sedangkan pemerataan kualitas sumber daya manusia melalui: Meningkatkan produktivitas industri perkapalan melalui peningkatan kualitas melalui sumber daya manusia. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Untuk meningkatkan daya saing, di tempuh melalui strategi: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kemaritiman, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung perikanan dan kelautan. Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan kemaritiman melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan jaringan kerjasama dengan stake holder kemaritiman.

Focus dan kegiatan pembangunan maritim di tahap pelaksanaan Tahun 2013: Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan Sasaran: Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perikanan tangkap dan budidaya. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan. Meningkatnya kelestarian sumber daya pantai dan terjaganya kualitas perairan dari pencemaran lingkungan. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan hasil perikanan dan jaringan pemasaran hasil perikanan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

Adapun sasaran meliputi: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri perikanan. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana kemaritiman

Sasaran berikutnya: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kemaritiman. Meningkatnya produktivitas perkapalan. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kemaritiman. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kemaritiman. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Sementara dukungan bagi Program Tegal Maritim adalah, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Kota Tegal. Berbagai institusi dengan bidang kerja kemaritiman turut memberikan dukungan berupa program dan kegiatan yang berlokasi, maupun mengambil sasaran warga Kota Tegal. Salah satu dukungan dari kementerian perhubungan dengan membangun pelabuhan Niaga sejak tahun 2011, pada tahun 2013 pelaksanaan pembangunan memasuki

tahap III dengan target output berupa groin sheetpile sepanjang 105 m berbiaya 10M. Proses pembangunan yang di targetkan selesai pada tahun 2015 ini akan mengubah kolam pelabuhan menjadi lebih dekat dengan laut lepas.

Selain itu Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penelitian dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), membentuk klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBis) Kota Tegal sejak tahun 2012. Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah lama mendirikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPT), dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Kota Tegal.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Letak geografis sebuah Negara sangat menentukan kedudukannya dalam pergaulan ekonomi internasional, baik secara pasif ataupun aktif. Letak Indonesia di Asia Pasifik merupakan posisi yang paling istimewa, karena secara geografis Indonesia merupakan jembatan antara daratan Asia dan benua Australia. Artinya, secara geografis Indonesia terletak di antara dua kawasan produks dan konsumsi.

Kepulauan Indonesia terletak tepat di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara samudera Pasifik dan samudera Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia, yang menghubungkan kepentingan Negara-negara besar dan maju di barat dan di timur, di utara, dan di selatan. Bagi Indonesia posisi di titik pembangunan ekonomi karena aksesnya yang luas ke pasar dunia. Terletak di pusat lalu lintas ekonomi perdagangan dunia, terutama melalui Selat Malaka dan Selat Sunda serta kadang-kadang melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang menghubungkan samudera Pasifik dengan samudera Hindia, dan merupakan jalur yang penting bagi perdangan produk-produk dari Asutralia menuju ke Jepang, Negara tersebut ke benua Afrika, kawasan Timur Tengah dan bahkan ke Eropa.

Kawasan Asia-Pasifik merupakan masa depan ekonomi dunia, dan Indonesia harus mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik perlu dibuat kebijakan dan tindakan aksi, yaitu mengintegrasikan melalui multi-gate system, antara lain dengan membukan pintu baru/pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, dengan pelabuhan dan bandara internasional yang berfungsi sebagai International hub-port, serta pengembangan infrastruktur penunjang dan pemberian



kewenangan khusus bagi wilayah kepulauan/perbatasan. Untuk pengembangan infrastruktur harus didasarkan pada sinergitas dan interkoneksi pembangunan daratan dan lautan sebagai satu kesatuan archipelagic state (land and marine base development).

Pemikiran geostrategic tentang Indonesia di Pasifik, sangat relevan dengan dinamika perkembangan local, regional dan internasional saat ini. Konsepsi geostrategic ini akan menjadi sumber inspirasi dan digunakan sebagai alat untuk menggali fakta geografik dan posisi geopolitik dalam mengembangkan geostrategic yang tepat dan komprehensif. Di masa kebangkitan Asia Pasifik saat ini, beberapa hal strategis diperlukan untuk bisa unggul dalam persaingan di era Pasifik, yaitu pembangunan yang berbasis geografi, geopolitik dan geostrategic, pengembangan ketahanan local dan peningkatan daya saing melalui industry kluster, serta dan pembangunan yang berorientasi Pasifik sebagai sebuah kawasan masa depan. Artinya, dalam konteks mewujudkan Indonesia sebagai pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik, maka dibutuhkan kebijakan seperti : perlunya reorientasi perencanaan pembangunan berbasis geopolitik dan geostrategic, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan pintu-pintu kegiatan ekonomi dan perdagangan yang saling interkoneksi karena konektivitas akan memudahkan suatu Negara dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi arus ekonomi global, membangun kolaborasi dan kompetisi antar daerah dan mengembangkan networking dengan Negara-negara kawasan Asia Pasifik.

Konsep *blue economy* saat ini sudah menjadi trend dunia. Sebagai sebuah daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia harus berusaha menjadikan laut sebagai basis pengembangan ekonomi ke depan. Fakta fisik yang tidak dibantah bahwa dari 5,8 juta km² wilayah Indonesia, $\frac{3}{4}$ bagiannya adalah berupa laut, terdiri dari 17.500 lebih pulau, yang terangkai oleh garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal inilah yang membuat komunitas global mengenal Indonesia sebagai Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut terbesar.

Negara ini kaya akan sumberdaya hayati laut, perikanan dan wilayah pesisir. Oleh karena itu menurut saya diperlukan adanya grand design pembangunan yang berorientasi pada pengembangan blue economy. Sumberdaya pesisir dan laut berperan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi baik regional dan dunia.

Diharapkan sector perikanan dan kelautan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Karena Indonesia terlahir sebagai Negara maritime dengan potensi kekuatan laut. Pengembangan *blue economy* akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan, industry perikanan, dan lingkungan. Implikasinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

2. Saran

Wilayah Indonesia yang berada di kawasan Asia-Pasifik, dituntut agar dapat berkontribusi dalam menggali potensi wilayah laut dan pesisir, karena peran sector perikanan dan kelautan di Asia Pasifik di masa depan penting bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia akan menjadi sorga investasi dan jadi contoh pengembangan *blue economy* dunia.

Sehingga dengan melihat deskripsi dan kritisi, potensi pertahanan yang sebenarnya sudah ada dan perlu digali lebih dalam adalah: 1) Semakin tipisnya sumberdaya alam di darat dari negara pulau dan kontinental mendorong aktivitas ekonomi penduduknya ke laut. Hal ini dibarengi dengan peningkatan kemampuan teknologi perkapalan di negara-negara tersebut, sehingga mampu menjelajah samudra dalam jangka lama; 2) Letak perairan Nusantara yang strategis (diantara perlintasan dua Samudra dan dua benua) dan posisinya di daerah khatulistiwa menjadikannya kaya dengan aneka jenis ikan dan biota laut lainnya. Dengan jasa teknologi Inderaja kekayaan laut Indonesia secara kasat mata dapat dilihat oleh seluruh dunia. Sementara itu teknologi kelautan kita tidak mengalami kemajuan yang signifikan sehingga terjadi kesenjangan kemampuan bahari yang semakin lebar dengan negara perambah laut Nusantara; 3) memantapkan serta memperkuat sistem pertahanan Negara; 4) Meningkatkan sistem pertahanan yang mampu menjamin tegaknya kedaulatan dengan melalui kehadiran kekuatan laut yang optimal; 5) menjamin keamanan atas seluruh kepulauan Indonesia meliputi wilayah darat, laut, serta udara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dan menjaga keutuhan seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah Negara, termasuk perbatasan, daerah pedalaman, pulau-pulau terluar dan terpencil; 6) mempertahankan integritas moral bangsa dalam menghadapi dampak globalisasi, berbagai macam krisis politik, ekonomi, social budaya dan krisis mental. Integrasi bangsa merupakan landasan bagi tegaknya sebuah Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar (Penyunting), *Politik Hukum Pembaharuan Hukum Pembangunan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2001.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Boediono, 2010, *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana ?*. KPG, Jakarta.
- Caporoso, J.A. & D.V. Levine, *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press, New York, 1992.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Dephan RI.
- Harrison, Lisa, 2009, *Metodologi Penelitian Politik*. Terjemahan Tri Wibowo. Kencana, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Filsafat*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2011. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2011*. Jakarta: Kemenhan RI.
- Kirbiantoro dan Dody Rudianto, 2010, *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Prospek*, Golden Terayon Press, Jakarta.
- M.D. Riyan, *Political Quotient*, Madani Prima, Bandung, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.
- Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2013.
- Riant Nugroho, *Social Policy for the Developing Countries*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Suryajaya, Martin, 2011, *Alan Badiou dan Masa Depan Markisme*, Resist Book, Yogyakarta.
- Sutrisno, Mudji, 2006, *Drijarkara: Filsuf yang Mengubah Indonesia*, GalangPress, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Filsafat Politik*, Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara